

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Kecamatan 2x11 Enam Lingkung

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



RENCANA KERJA [RENJA] TAHUN 2026

**KECAMATAN 2X11 ANAM
LINGKUANG
KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN 2x11 ANAM LINGKUANG

Jl. Raya Padang-Bukittinggi Km 45 Sicincin

Kode Pos: 25584

KEPUTUSAN CAMAT 2X11 ENAM LINGKUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 012.1/KEP/CSC/2025

TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja Kecamatan 2X11 Anam Lingkung Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
- KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- KETIGA : Rencana Kerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini, Anggaran Penyusunan Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Ditetapkan di : Sicincin

Pada Tanggal : 01 Juli 2025

CAMAT 2x11 ANAM LINGKUANG



ARDINAL, SH

Pembina/IV.a

NIP. 19710716 200604 1 011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan kita yang tercinta.

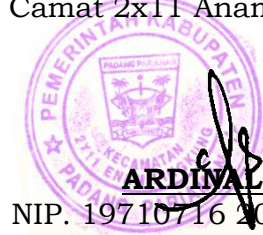
Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang, 15 Januari 2026
Camat 2x11 Anam Lingkuang



ARDINAL, SH
NIP. 19710716 200604 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	18
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	65
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	66
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	99
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	99
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	105
3.3. Program dan Kegiatan	107
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	131
BABV PENUTUP	171

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan

proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

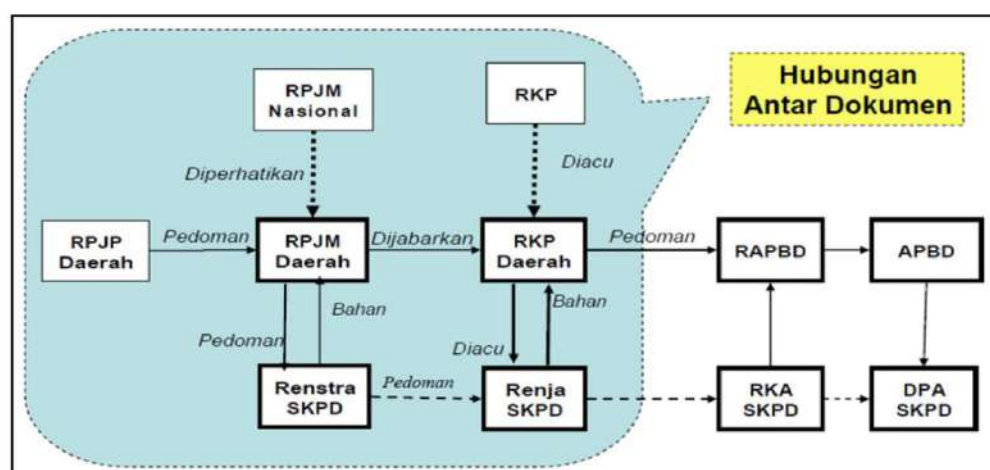
Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti

Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 2x11 Anam Lingsu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 2x11 Anam Lingsu disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingsu merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingsu merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Kecamatan ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik Kecamatan dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan 2x11

Anam Lingkuang untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam penyusunan Renja, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dengan Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renstra tahun 2021-2026 harus selaras

dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja Kecamatan dalam jangka pendek, sehingga Kecamatan dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis Kecamatan dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 20021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan dokumen perencanaan tahunan yang menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, lokasi, dan indikator kinerja dengan kebutuhan pembangunan daerah berdasarkan Renstra PD dan RKPD.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antar unit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa

mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

N O	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targe t	Realisa si	%	Sat uan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Koa	100 %	93 %	93 %	%	712.480.557	666.941.597	93,60
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	98 %	98 %	%	3.465.000	3.278.800	94,62
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	18	14	77,77	Paket	660.000	498.000	75,45
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	350	250	71,42	Oran g	2.085.000	2.780.800	99,13
	JUMLAH	368	264	71,73		3.465.000	3.278.800	94,62

2. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Tabel 2.2

**Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra Kegiatan Pemeliharaan Barang
milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	93 %	93 %	%	712.480.557	666.941.597	93,60
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	3	100	Objek	17.608.000	16.134.500	91,63
1.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	12	9	75	Unit	2.030.000	1.230.000	60,59
	JUMLAH	15	12	80	Unit	2.030.000	1.230.000	60,59

b. Program Penyelenggaraan dan Pemerintahan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Tabel 2.3

**Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra Kegiatan Pelaksanaan Urusan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penyelenggaraan dan Pemerintahan Pelayanan Publik	100	85	85	Nilai	3.000.000	2.910.000	97
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	85	85	%	1.500.000	1.470.000	98
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1500	1470	98	Surat	1.500.000	1.470.000	98
	JUMLAH	1500	1470	98	Surat	1.500.000	1.490.000	98

2. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan

Tabel 2.4
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penyelenggaraan dan Pemerintahan Pelayanan Publik	100	85	85	Nilai	3.000.000	2.910.000	97
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	8	6	85	Laporan	1.500.000	1.440.000	96
1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	24	14	58,33	Sekolah	1.500.000	1.440.000	96
	JUMLAH	24	14	58,33	Sekolah	1.500.000	1.440.000	96

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang di rencanakan

a. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Tabel 2.5
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	93 %	93 %	%	712.480.557	666.941.597	93,60
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100	%	5.434.100	5.399.825	99,36
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100	Dokumen	2.594.100	2.590.000	99,84
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	100	laporan	2.840.000	2.809.825	98,93
	JUMLAH	10	10	200		5.434.100	5.399.825	99,36

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.6
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	93 %	93 %	%	712.480.557	666.941.597	93,60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100	Laporan	452.726.167	423.612.434	93,56
1	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12	12	100	Laporan	33.720.000	32.790.000	97,24
2	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	13	13	100	laporan	419.006.167	390.822.434	93,27
	JUMLAH	25	25	200		452.726.167	423.612.434	93,56

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tabel 2.7

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja				Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Target	Realisasi	%	Satuan		(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	93 %	93 %	%	712.480.557	666.941.597	93,60
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	12	100	Laporan	88.959.650	83.222.549	93,55
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD		12	12	100	Laporan	87.504.800	81.772.549	93,44
2	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor		30	30	100	Paket	1.454.850	1.450.000	99,66
	JUMLAH		42	42	200		88.959.650	83.222.549	93,55

4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Tabel 2.8

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja				Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Target	Realisasi	%	Satuan		(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	93 %	93 %	%	712.480.557	666.941.597	93,60
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	100	100	%	117.198.640	108.209.489	92,32
1	Penyediaan jasa surat menyurat		12	12	100	Laporan	12.331.200	10.703.050	86,79

2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	12	100	Laporan	11.800.000	11.506.439	97,51
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	100	Laporan	93.067.440	86.000.000	92,40
JUMLAH		36	36	300		117.198.640	108.209.489	92,32

5. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Tabel 2.9

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Koa		100 %	93 %	93 %	%	712.480.557	666.941.597	93,60
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2	2	100	Objek	15.578.000	14.905.500	95,67
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	100	Unit	13,850,000	13,804.500	99.67
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100	Unit	1.728.000	1.100.000	63,65
	JUMLAH	3	3	200	Unit	15.578.000	14.905.500	95,67

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2.10

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

N O	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	93 %	93 %	%	712.480.557	666.941.597	93,60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	2	100	Unit	27.089.000	27.084.000	99,98
1	Pengadaan Mebel	1	1	100	Unit	15.989.000	15.984.000	99,96
2	Pengadaan peralatan dan mesin	1	1	100	unit	11.100.000	11.100.000	100
	JUMLAH	2	2	200		27.089.000	27.084.000	99,98

b. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Tabel 2.11

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	Persen	4.000.000	3.980.000	99,50
	Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan	12	12	100	Laporan	4.000.000	3.980.000	99,50

pengawasan pemerintahan desa								
1	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	9	9	100	Kegiatan	2.000.000	1.980.000	99
2	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12	12	100	Laporan	2.000.000	2.000.000	100
JUMLAH		21	21	200		4.000.000	3.980.000	99,50

c. Program pemerdayaan masyarakat desa dan kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemerdayaan desa

Tabel 2.12

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kegiatan Koordinasi kegiatan pemerdayaan desa

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Ta rg et	Realisa si	%	Satu an	(Rp)	(Rp)	%
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100	100	100	%	33.687.000	31.005.105	92,03
Kegiatan koordinasi kegiatan pemerdayaan desa		100	100	100	%	33.687.000	31.005.105	92,03
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan desa	36	36	100	Usulan	3.922.000	3.784.800	96,50
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4	4	100	Laporan	29.765.000	27.220.305	91,45
	JUMLAH	40	40	200		33.687.000	31.005.105	92,03

d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

1. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

Tabel 2.13

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kegiatan Koordinasi kegiatan pemerdayaan desa

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	%	46.805.000	46.430.800	99,20
	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugaasan kepala daerah	2	2	100	Laporan	46.805.000	46.430.800	99,20
1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	2	2	100	Kegiatan	3.505.000	3.281.000	93,60
2	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan secara vertikal	2	2	100	Kegiatan	43.300.000	43.149.800	99,65
	JUMLAH	4	4	200		46.805.000	46.430.800	99,20

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

kecamatan 2X11 Anam Lingkuang tidak ada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kerangka Acuan Kerja yang telah disusun
- b. Terjadinya komunikasi yang baik serta kerja sama yang baik antara pimpinan dan semua pegawai lainnya untuk mencapai target kinerja
- c. Adanya koordinasi yang baik antara Forum pimpinan Kecamatan, Nagari, serta UPTD yang ada di kecamatan 2X11 Anam Lingkuang.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Belum adanya surat penyediaan Dana (SPD) pada SIPD membuat terhalangnya pelaksanaan kegiatan
- b. Jumlah sumber daya manusia yang tidak mencukupi
- c. Sarana dan Prasarana yang tidak memadai
- d. Ketidaksesuaian kegiatan pada Renstra

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Kecamatan dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga

capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.

- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025. Jika Kecamatan tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus .
Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan

pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi .

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang

lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.14 (T-C 29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Pencapaian Renstra Kecamatan 2x11
Enam Lingkung s/d Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)x100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah daerah	100	100	100	100		100		
		Nilai SAKIP perangkat daerah Hasil evaluasi Inspektorat	BB							
		Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100							
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100		

7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja,Renja- P,RKA,DPA, RKA-P, DPA=P yang disusun	6	6	6	6	100	6	18	3
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP, SAKIP, LPPD, laporan keuangan	4	4	4	4	100	4	12	3
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	300	3
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium PA,PPK,PPTK, Bendahara yang disediakan	12	12	12	12	100	12	36	3
7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima TPP, honor kegiatan, gaji tiga belas dan gaji empat belas selama 1 Tahun	14	14	14	14	100	14	42	3
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	pesentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegaa perangkat daerah	100	20	100		0	20	40	0,4
7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12						0	0
7 01 01 2.05 0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan	5	1	11		0,00	1	2	0,4

7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	100	95	100	95	95	95	285	2,85
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	jumlah alat listrik yang tersedia	27	20	18	15	83,33	20	55	2,04
7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunungan Tamu	Jumlah Makanan an Minumana yang disediakan	330	220	350	240	68,57	220	680	2,06
7 01 01 2.06 0009	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	36	3
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan perlatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1	50			#DIV/0!	50	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40	35			35	#DIV/0!
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	300	3
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	700	700	700	675	96,43	700	2075,00	2,96
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan	12	12	12	12	100	12	36	3

		listrik yang disediakan								
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga swakelola, tenaga IT Sopir dan tenaga kebersihan yang disediakan	12	12	12	12	100	12	36	3
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6						0	0
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah	100	90	100	100	100	90	280	2,8
7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2	2	2	100	2	6	3
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	12	2	2	100,00	12	26	1,3
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2	2	1	1	100	2	5	2,5

		Dipelihara/Direhabilitasi								
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	0	0	2	0	0	0	0	#DIV/0!
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1						0	0
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5		3	3	100		3	0,6
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5		1	1	100		1	0,2
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1						0	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1						0	0

7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Pembinaan UKS di jenjang pendidikan dasar dan menengah	100	95	100	95	95	95	285	2,85
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terpenuhinya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	95	100	95	95	95	285	2,85
7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pengaduan Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu yang tertangani	1600	1100	1500	1100	73,33	1100	3300	2,0625
		Persentase Sarana Prasrana Pelayanan								
		Persentase SDM yang Kompeten dan Berintegritas								
		Jumlah SOP dan SP yang dimiliki								
		Jumlah Pelayanan yang dilayani								
		Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan								
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	0	75	100	85	85	75	235	#DIV/0!

7 01 02 2.01 0002	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah UKS yang dibina	24	13	24	13	54,17	13	39	1,625
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lembaga pendidikan alquran yang menghasilkan hafiz hafizah	8							0
		Jumlah Safari Ramadan tingkat Kecamatan								
		Jumlah MTQ Tingkat Nagari								
		jumlah pesantren Ramadhan Tingkat Kecamatan								
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong	100	100	100	100	100	100	300	3
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Sinergitas, Konsentrasi dan Sinkronisasi antar dokumen perencanaan	100	100	100	100	100	100	300	3
7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	35	35	35	35	100	35	105	3

7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	4	4	100	4	12	3
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dapat dibina	100	0	100	0	0	0	0	0
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	0	100	0	0	0	0	0
7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	12	0	12	0	0	0	0	0
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasi kegiatan keagamaan di kecamatan	100	100	100	100	100	100	300	3
7 01 05 2.01	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala	100	100	100	100	100	100	300	3

		daerah di kecamatan								
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5	6	6	6	100	6	18	3,6
7 01 05 2.01 0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	2	2	2	100	2	6	3

7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	100	100	100	300	3
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100	100	100	100	100	100	300	3
7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan administrasi Nagari	9	9	9	9	100	9	27	3
7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Biimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	95	90	100	90	90	90	270	2,84

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang SOTK, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan.
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang , juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi memiliki tugas pokok dan fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 2 x 11 Anam Lingsu Kab. Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;

- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan

- 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.

- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;

- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja (SOP) pada Dinas;
- g. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- h. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- i. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- j. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- k. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Kecamatan 2x11 Anam Lingsu Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Umum Pemerintahan, Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
- b). Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kewilayahan Berbasis Efektifitas dan Efisiensi
3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan Daerah
4. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- c). Indikator Kinerja : 1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
 3. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan
 4. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tabel 2. 15 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Indikator Kinerja tahun 2024	Indikator Kinerja tahun 2025	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2027	2025	2026	2026	2027	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	95		100	100	
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	76,61	76,61	88,31	88,31	B		BB	BB	
3.	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	100	100	100	85		100	100	
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB (75,60)		BB	BB	

Analisis kinerja pelayanan kecamatan merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan kecamatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	B	B	100	Berhasil
		3.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	85	85	Berhasil
3.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	4.	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	BB	BB	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :

- 1) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan
- 2) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
- 3) Persentase Partisipasi masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah
- 4) Hasil Penialian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 95 %. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 95 % yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Kedepan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	B	B	100	Berhasil
		2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	85	85	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan Layanan Masyarakat yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat serta persentase Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Masyarakat di tingkat kecamatan mencapai 100 %. Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 100 %. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh aparaturnya kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta

penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

III. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	1.	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	BB	BB	100	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai 100 %, yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 :

Tabel 2.20
Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	3,15	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	75	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	40	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	35	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan 2x11 Enam Lingkung sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dari 4 indikator tidak terdapat indikator yang belum mencapai target 100%.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan 2x11 Enam Lingkung antara lain :

1. Kurangnya sarana dan prasarana pada Kecamatan
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada kecamatan 2x11 Anam Lingkuang
3. Kurangnya Anggaran membuat kegiatan lama terlaksana

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.21
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp. 000)	
	PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG					Pindahkan yang disebelah					
	UNSUR KEWILAYAHAN				723.878. 427					723.878. 427	
	KECAMATAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100 persen BB Nilai	651.173. 427	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100 persen BB Nilai	651.173. 427	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	6.865.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	6.865.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.765.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.765.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.100.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.100.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		438.040.227	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		438.040.227	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	400.000.227		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	400.000.227	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	38.040.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	38.040.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	undefined undefined	660.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	undefined undefined	660.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	660.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	660.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam	Jumlah Surat Dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	450 Surat	73.521.050	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam	Jumlah Surat Dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	450 Surat	73.521.050	

		Lingku ang, Semua Kel/De sa	jumlah pelayanan yang terfasilitasi				Lingku ang, Semua Kel/De sa	jumlah pelayanan yang terfasilitasi			
	Penyediaan Komponen Instalasi					Penyediaan Komponen Instalasi					
	Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor					Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor					
		Kab. Padang Pariama n, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.123.00 0		Kab. Padang Pariama n, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.123.00 0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.938.050		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.938.050	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.780.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.780.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	67.680.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	67.680.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku	Jumlah Penambahan Nilai Aset	7 unit	28.300.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku	Jumlah Penambahan Nilai Aset	7 unit	28.300.000	

		ang, Semua Kel/De sa					ang, Semua Kel/De sa				
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	-		Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-		Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia	10 Jasa 10 Jasa			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia	10 Jasa 10 Jasa		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				28.300.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				28.300.000	
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan				Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.111.150		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.111.150	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.000.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang,	Jumlah Aset yang dikelola	6 objek	16.676.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang,	Jumlah Aset yang dikelola	6 objek	16.676.000	

		Semua Kel/De sa					Semua Kel/De sa				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	10.737.5 00		Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	10.737.5 00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	3.450.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	3.450.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.488.500		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.488.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	5 Unit	0,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	5 Unit	0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan,Perse ntase UKPP Kecamatan bernilai baik, persentase sarana dan prasarana kecamatan dalam kondisi baik	90 Nilai	3.410.00 0	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan,Perse ntase UKPP Kecamatan bernilai baik, persentase sarana dan prasarana kecamatan dalam kondisi baik	90 Nilai	3.410.00 0	

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Pelayanan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian	12 Laporan	3.410.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Pelayanan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian	12 Laporan	3.410.000	
--	-------------------------------------	---	---	------------	-----------	-------------------------------------	---	---	------------	-----------	--

			SPM Tingkat Kecamatan					SPM Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	1.410.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	1.410.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Pelayanan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	10 laporan	1.410.00 0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Pelayanan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	10 laporan	1.410.00 0	
--	---	--	---	------------	---------------	---	--	---	------------	---------------	--

			Dilimpahkan kepada Camat					Dilimpahkan kepada Camat			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	2.000.00 0,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	2.000.00 0,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	100 persen	20.155.0 00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	100 persen	20.155.0 00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7 dokumen 10 dokumen	20.155.0 00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7 dokumen 10 dokumen	20.155.0 00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	16.155.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	16.155.000	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Persentase Kamtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal yang dilaksanakan Persentase Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dilaksanakan	100 persen	3.200.00 0,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Persentase Kamtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal yang dilaksanakan Persentase Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dilaksanakan	100 persen	3.200.00 0,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tugas forum Pimpinan Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	12 Laporan	3.200.00 0,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tugas forum Pimpinan Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	12 Laporan	3.200.00 0,00	

			Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	2.040.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	2.040.000	

		Lingku ang, Semua Kel/De sa	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Lingku ang, Semua Kel/De sa	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan	100 persen 80 persen	44.100.0 00	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan	100 persen 80 persen	44.100.0 00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 laporan	44.100.0 00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Padang Pariam an, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 laporan	44.100.0 00	

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17 Orang	8.500.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17 Orang	8.500.000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna				0,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna				0,00	

	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15 Orang	0,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15 Orang	0,00	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dokumen	0,00		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dokumen	0,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	100 persen	3.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	100 persen	3.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 laporan	3.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 laporan	3.000.000	

		Kel/De sa					Kel/De sa				
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	1.500.00 0		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingku ang, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	1.500.00 0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					

		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	1.500.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	1.500.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					
		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	1.500.000		Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	1.500.000	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Namun dalam proses ini Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Lkota	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85.00
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	3,15
		Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Partai Politik yang Aktif	75
		Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	40
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100
		Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	35

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah.

Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, maju dan merata

4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonis dan berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Tabel 3.2
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.	Prioritas 2. Membangun Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat.	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri	
		Prioritas 5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah Lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan sosial

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.	Prioritas 2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam Negeri	Prioritas 3. Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Prioritas 4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi berbasis Digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Prioritas 4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi berbasis Digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Prioritas 2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah ” **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Umum Pemerintahan, terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.**” dengan Indikator Tujuan ” **Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat**”

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan 2x11 Anam Lingsu Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	70,05	75,60	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,35	73	75	77	78	79	79,45
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95

3.3 Program dan Kegiatan

- a.** Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingsu Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan 2x11 Anam Lingsu mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4), memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan

kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAH KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG				723.878.427				998.846.929
	UNSUR KEWILAYAHAN				723.878.427				998.846.929
7 01	KECAMATAN				723.878.427				998.846.929
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	100 persen BB Nilai	651.173.427			100 persen BB Nilai	88.234.629

7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	4 dokumen	6.865.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 dokumen	11.500.000
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	3.765.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	6.000.000
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	4 Laporan	3.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	3.675.000,00

7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan			438.040.227	DANA TRANSE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM			518.326.929
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Orang/bu lan	400.000.227	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Orang/bulan	482.846.929
7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	38.040.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	35.480.000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	undefine d undefine d	660.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		undefined undefined	17.420.000
7 01 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								

		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	5.000.000
7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	0	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Paket	10.000.000
7 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	5 Orang	660.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Orang	2.420.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Surat Dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	200 Surat	73.521.050	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200 Surat	95.500.000

7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	15 Paket	1.123.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Paket	2.000.000
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	30 Paket	1.938.050	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	2.500.000
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	2.400.000,00
7 01 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu								

		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.780.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.000.000
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	67.680.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	870.000.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kel/Desa	2 unit	28.300.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 unit	80.000.000
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kel/Desa	Unit	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	35.000.000

7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	5 Unit	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	15.000.000
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	1 Unit	28.300.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Unit	20.000.000
7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa			DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	5.000.000

7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia Jumlah Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan yang Tersedia	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	10 Jasa 10 Jasa	87.111.150	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Jasa 10 Jasa	115.600.000
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.111.150	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	15.000.000
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	17.000.000
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	63.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	81.500.000

7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset yang dikelola	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	6 objek	16.676.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 objek	44.000.000
7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	2 Unit	10.737.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	32.000.000
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	8 Unit	3.450.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Unit	7.000.000
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kel/Desa	2 Unit	2.488.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	5.000.000
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kel/Desa		0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan, Persentase UKPP Kecamatan bernilai baik, persentase sarana dan prasarana kecamatan dalam kondisi baik	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kel/Desa	90 Nilai	3.410.000			90 Nilai	6.600.000,00

7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Pelayanan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.410.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.500.000,00
7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1.410.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	4.500.000,00
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Pelayanan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	10 laporan	1.410.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 laporan	2.100.000,00

7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	2.100.000,00
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	100 persen	20.155.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 persen	35.000.000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	7 dokumen 10 dokumen	20.155.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 dokumen 10 dokumen	36.477.000,00
7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	8 Lembaga Kemasyar akatan	4.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Lembaga Kemasyaraka tan	5.000.000
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	16.155.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	27.000.000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal yang dilaksanakan Persentase Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	100 persen	2.040.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 persen	5.500.000

7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tugas forum Pimpinan Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.040.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	5.500.000
7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.040.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	4.000.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	100 persen 80 persen	44.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 persen 80 persen	73.400.000,00
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	1 laporan	44.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 laporan	60.000.000
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan								

	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	17 Orang	8.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Orang	10.000.000
7 01 05 2.01 0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	15 Orang	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Orang	4.200.000,00
7 01 05 2.01 0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	35.600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	50.000.000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	100 persen	7.551.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 persen	12.588.750,00

7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	12 laporan	3.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 laporan	12.588.750,00
7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	6.000.000,00
7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	3.000.000
7 01 06 2.01 0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	4.000.000
					723.878.427				998.846.929

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangkan isu-isu strategis, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kabupaten Padang Pariaman khususnya, maka dirumuskan rencana kerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG KAB. PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PE RANG KAT DAER AH PENA NGGU NG JAWA B
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG						723.878.427,40							998.846.929,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						72.705.000,00							116.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						72.705.000,00							116.500.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana kecamatan dalam kondisi baik Nilai PEKPP Mandiri Kecamatan	-			100 % 100 % B Nilai	3.410.000,00						-	5.000.000,00	
		[Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait]	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik Persentase UKPP	100	100	100	100	3.410.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-

			Kecamatan Bernilai Baik													
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggara an Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan	-			2 Dokumen 9 Dokumen - Laporan - Laporan	1.410.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	Masya rakat	-	2.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Masyarakat		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				12 Dokumen	1.410.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	asaya kat		2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	-			100 %	2.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	asayarakat	-	3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan	asayarakat		3.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

												an Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya				
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	-			100 %	20.155.000,00						-	35.000.000,00	
		[Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	100	100	100	100	20.155.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000.000,00	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			7 Dokumen 10 Dokumen	20.155.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-	-	35.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				10 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		5.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				6 Dokumen	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		3.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	16.155.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Languang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-		27.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
3,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Permasalahan keamanan dan ketertiban yang terselesaikan</i>	-			100 %	2.040.000,00					-		5.500.000,00	
		[Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum]	<i>Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan</i>	100	100	100	100	2.040.000,00	-	-	-	-	-	-	5.500.000,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tugas Forum Pimpinan Kecamatan</i>	-			1 Kali 12 Kali - Kali 12 Kali	2.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	Masyarakat	-	5.500.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

			Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	2.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	Masyarakat		4.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	Masyarakat		1.500.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUP
4,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	-			N/A undefined undefined	44.100.000,00					-		60.000.000,00	
		[Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan]	Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	100	100	100	100	44.100.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	-

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	-			1 Laporan	44.100.000,0 0			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-	-	60.000.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan</i>				50 Orang	8.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		10.000.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG

			Republik Indonesia													
	7.01.05. 2.01.00 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				0 Laporan	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		0,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	7.01.05. 2.01.00 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														

			<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>				1 Dokumen	35.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		50.000.000,00	PERMINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		0,00	PERMINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
5,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa Mandiri di Kecamatan</i>	-			100 %	3.000.000,00						-	11.000.000,00	
		[Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	11.000.000,00	-

		pemerintahan desa]														
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			12 Laporan	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-	-	11.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.06.2.01.00.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0 Dokumen	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		0,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.06.2.01.00.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuag , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-		3.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa</i>				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuag , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-		4.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														

			<i>Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		4.000.000,00	PEMERINTAH KEKABUPATEN 2X11 ENAM LINGGUANG
	X	ON URUSAN						651.173.427,40							882.346.929,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						651.173.427,40							882.346.929,00	
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti</i>	-			100 % 100 % % A Nilai B Nilai	651.173.427,40						-	882.346.929,00	
		-	-	-	-	-	-	651.173.427,40	-	-	-	-	-	-	882.346.929,00	-

	X.XX.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</i>	-			6 Dokumen 1 Dokumen 100 %	6.865.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-	-	11.500.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	X.XX.01 .2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	3.765.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		6.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	X.XX.01 .2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	3.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkup , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		5.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUP
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-			12 Laporan 1 tahun	438.040.227,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-	-	518.326.929,00	PEMERINTAH KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUP
	X.XX.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	400.000.227,40	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuag , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-		482.846.929,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	38.040.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuag , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdayasaing 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-		35.480.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

	X.XX.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	pesentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegaai perangkat daerah pesentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegaai perangkat daerah	-			1 tahun 1 tahun	660.000,00			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-	-	17.420.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	X.XX.01 .2.05.00 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup	-		5.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG

												an Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya				
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-		10.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	660.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memper	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,	-		2.420.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM

											erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya					LINGK UNG
	X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	-			200 surat	73.521.050,0 0			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-	-	95.500.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG	

	X.XX.01 .2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	1.123.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		2.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	X.XX.01 .2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		0,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	1.938.050,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		2.500.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG	
	X.XX.01 .2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-		0,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.780.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		4.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG	
	X.XX.01 .2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	67.680.000,0 0	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		8 7.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah penambahan nilai aset</i>	-			2 Unit	28.300.000,0 0			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang	-	-	8 0.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG

											Religius , Harmon is dan Berbud aya					
	X.XX.01 .2.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		5.000.000,00 ³	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	X.XX.01 .2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah	-		0,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG

											egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	uan , Terampil dan Berdaya Saing 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya				
	X.XX.01 .2.07.00 05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-		15.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

	X.XX.01 .2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	28.300.000,0 0	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		20.000.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	X.XX.01 .2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5.	-		5.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG

											nyeludupan .	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya				
	X.XX.01 .2.07.00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-		5.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

	X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	-			10 jasa	87.111.150,0 0			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-	-	115.600.000, 00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG	
	X.XX.01 .2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.111.150,0 0	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		15.000.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG	
	X.XX.01 .2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,0 0	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		17.000.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG	
	X.XX.01 .2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		2.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	X.XX.01 .2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	63.000.000,0 0	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		81.600.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah Persentase tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur perangkat daerah</i>	-			1 tahun 1 tahun	16.676.000,0 0			Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang	-	-	44.000.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG

											Religius , Harmon is dan Berbud aya					
	X.XX.01 .2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	10.737.500,0 0	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah uan , Terampi l dan Berdaya Saing 5. Mewuju d kan Kehidup an Sosial yang Religius , Harmon is dan Berbud aya	-		32.000.000,0 0	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG
	X.XX.01 .2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	3.450.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc	Mening katk an Kualitas Sumber Daya Manusi a yang Sehat, Berp engetah	-		7.000.000,00	PEME RINTA H KECA MATA N 2X11 ENAM LINGK UNG

											egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	uan , Terampil dan Berdaya Saing 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya				
	X.XX.01 .2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.488.500,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-		5.000.000,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

	X.XX.01 .2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius , Harmonis dan Berbudaya	-		0,00	PEMERINTAH KEKAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
		J U M L A H						723.878.427,40							998.846.929,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan

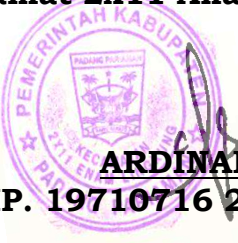
program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang, 15 Januari 2026

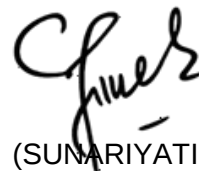
Camat 2x11 Anam Lingkuang


ARDINAL, SH
NIP. 19710716 200604 1 011

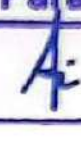
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN 2 x 11 ANAM LINGKUANG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	